ELEMEN SUKSES E-GOVERNMENT MELALUI IMPLEMENTASI APLIKASI E-MONEV DALAM PELAPORAN REALISASI KERJA PERANGKAT DAERAH DI BAPPEDA KABUPATEN MALINAU

Muhammad Wahyu Anugerah
NPP. 33.0833
Program Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
Email: mwahyua99@gmail.com
Pembimbing Skripsi: Drs. H. Sabaruddin, M.Ag
Email: sabaruddin1261@gmail.com

ABSTRACT

***Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap)**: The low level of regional apparatus performance achievement and the suboptimal budget realization indicate that the utilization of the E-Monev system has not functioned effectively as a monitoring and evaluation tool at the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Malinau Regency. **Purpose**: This study aims to examine the success factors of E-Government implementation through the utilization of the E-Monev application in reporting the realization of regional government work programs. **Method**: This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies. The analysis was conducted using the E-Government Success Elements framework developed by the Harvard JFK School of Government as adapted by Indrajit (2016), consisting of three dimensions: Support, Capacity, and Value. **Results/Findings**: The Support dimension revealed adequate leadership commitment and regulatory support; however, coordination among regional government agencies was not consistently implemented. The Capacity dimension indicated limitations in human resource competencies and unequal digital infrastructure availability. In terms of Value, the E-Monev application contributed to improved reporting efficiency and data accuracy, although its utilization as a basis for strategic decision-making remained suboptimal. **Conclusion**: The implementation of E-Monev has not yet been fully optimized due to the lack of strong synergy among the dimensions of Support, Capacity, and Value. Strengthening institutional coordination, enhancing human resource capacity, and optimizing data utilization are necessary to support digital-based governance.*
Keywords: Capacity**; E-Government; E-Monev; Monitoring and Evaluation; Support; Value**.

ABSTRAK

Permasalahan (Research Gap): Masih rendahnya capaian kinerja perangkat daerah serta belum optimalnya realisasi anggaran mengindikasikan bahwa pemanfaatan sistem E-Monev belum berjalan secara efektif sebagai alat monitoring dan evaluasi di Bappeda Kabupaten Malinau. **Tujuan:** Penelitian

ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor keberhasilan implementasi E-Government melalui penggunaan aplikasi E-Monev dalam pelaporan realisasi program kerja perangkat daerah. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta dianalisis menggunakan kerangka elemen sukses E-Government (Support, Capacity, Value) dari Harvard JFK School of Government dalam Indrajit (2016). **Hasil/Temuan:** Pada dimensi Support terdapat komitmen pimpinan dan dasar regulasi yang memadai, namun koordinasi antarperangkat daerah belum konsisten. Pada dimensi Capacity ditemukan keterbatasan kompetensi SDM dan belum meratanya infrastruktur digital. Pada dimensi Value, aplikasi E-Monev mampu meningkatkan efisiensi pelaporan dan ketepatan data, meskipun belum optimal sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. **Kesimpulan:** Implementasi E-Monev belum sepenuhnya optimal karena belum terbangunnya sinergi yang kuat antara dimensi Support, Capacity, dan Value. Diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi pemanfaatan data dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Kata kunci: Capacity; E-Government; E-Monev; Monitoring dan Evaluasi; Support; Value

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda utama reformasi birokrasi di Indonesia melalui penerapan Electronic Government (E-Government). Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data (Indrajit, 2016). Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengamanatkan integrasi sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang lebih efektif dan responsif.

Dalam konteks pembangunan daerah, monitoring dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Perkembangan teknologi mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik atau Electronic Monitoring and Evaluation (E-Monev) guna meningkatkan kualitas pelaporan, akurasi data, serta efektivitas pengendalian pembangunan (Rozikin et al., 2020). Implementasi E-Monev juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan prinsip good governance melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Indrayani & Sadikin, 2021).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malinau telah mengimplementasikan aplikasi E-Monev sebagai media pelaporan realisasi kerja perangkat daerah secara digital. Sistem ini dirancang untuk memudahkan perangkat daerah dalam menyampaikan data capaian program, kegiatan, dan subkegiatan secara berkala sehingga proses monitoring pembangunan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi. Namun demikian, implementasi aplikasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Data capaian kinerja perangkat daerah tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja baru mencapai 26,72 persen dan realisasi anggaran sebesar 18,65 persen. Selain itu, masih ditemukan keterlambatan pelaporan, ketidaklengkapan

pengisian data, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap

Berbagai penelitian mengenai E-Government dan sistem monitoring berbasis elektronik masih didominasi oleh kajian kuantitatif dan berfokus pada kepuasan pengguna semata (Sabani, 2021; Doran et al., 2023). Penelitian yang secara mendalam mengkaji elemen-elemen keberhasilan (success elements) implementasi E-Monev di lingkungan pemerintahan daerah tingkat kabupaten, khususnya di daerah kepulauan dan terpencil seperti Kabupaten Malinau, masih sangat terbatas. Seyselis dan Pradana (2021) mengkaji E-Monev di Bappeko Surabaya, namun tidak menyentuh konteks geografis dan kapasitas organisasi daerah terpencil. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan kerangka Harvard JFK School of Government yang memadukan dimensi Support, Capacity, dan Value secara holistik (Indrajit, 2016).

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting karena memberikan gambaran empiris mengenai faktor sukses implementasi E-Monev di Bappeda Kabupaten Malinau sebagai dasar perumusan strategi penguatan tata kelola pemerintahan digital. Manoharan et al. (2023) menegaskan bahwa evaluasi berbasis bukti (evidence-based evaluation) merupakan prasyarat dalam pengembangan digital governance yang berkelanjutan. Apabila tidak dilaksanakan, pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami hambatan dan peluang digitalisasi monitoring evaluasi daerah.

1.4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dijadikan landasan dalam penelitian ini. Pertama, Seyselis dan Pradana (2021) mengkaji efektivitas sistem Electronic Monitoring and Evaluation (E-Monev) di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya dan menemukan bahwa sistem E-Monev efektif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja organisasi. Kedua, (Vallen Dwi Puspita et al., 2024) meneliti implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev) di Bappeda Provinsi Lampung dan menemukan bahwa implementasi sistem belum berjalan optimal akibat ketidaksesuaian indikator kinerja serta belum terintegrasinya data perencanaan secara menyeluruh. Ketiga, (Amanda, 2025) menganalisis efektivitas aplikasi E-Monev dalam monitoring penyerapan anggaran di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan menemukan bahwa sistem mampu meningkatkan efektivitas monitoring meskipun masih menghadapi kendala infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.

Keempat, (Zulkarnaen & Ruma, 2024)meneliti pengaruh implementasi monitoring dan evaluasi terhadap transparansi laporan keuangan Bappeda Kota Parepare dan menemukan bahwa monitoring dan evaluasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Kelima, (Romodon, 2020) mengkaji penerapan Sistem Informasi Pencairan Dana Secara Elektronik (SiPECEL) dan E-Monev di Kabupaten Blitar serta menemukan bahwa integrasi kedua sistem tersebut mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, sebagian besar kajian masih berfokus pada efektivitas sistem, transparansi laporan keuangan, dan monitoring anggaran. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi aplikasi E-Monev dalam pelaporan realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) menggunakan perspektif Elemen Sukses E-Government yang

mencakup dimensi *Support*, *Capacity*, dan *Value* masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengambil lokus penelitian pada Bappeda Kabupaten Malinau.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena mengkaji secara komprehensif tiga dimensi elemen sukses (Support, Capacity, Value) secara bersamaan dalam konteks E-Monev di pemerintahan daerah kabupaten yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur khas wilayah Kalimantan. Pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan mampu menangkap dinamika implementasi secara mendalam yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data statistik (Creswell, 2018). Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur E-Government dengan memperluas aplikasi kerangka Harvard JFK pada konteks daerah terpencil di Indonesia.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai elemen sukses E-Government melalui implementasi aplikasi E-Monev dalam pelaporan realisasi kerja perangkat daerah di Bappeda Kabupaten Malinau, mencakup dimensi Support, Capacity, dan Value

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika dan proses implementasi E-Monev yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka (Creswell, 2018). Lokasi penelitian adalah Bappeda Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, yang dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2026.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: (1) wawancara mendalam semi-terstruktur, (2) observasi langsung, dan (3) studi dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria memiliki keterlibatan langsung dalam implementasi E-Monev. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik. Analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014) yang mengacu pada kerangka dimensi Support, Capacity, dan Value.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan / Instansi	Peran dalam E-Monev	Teknik Pengumpulan Data
1	I-1	Kepala Bappeda Kab. Malinau	Informan Kunci pengambil kebijakan E-Monev	Wawancara mendalam, Dokumentasi
2	I-2	Kabid Monitoring dan Evaluasi, Bappeda	Koordinator pelaksanaan E-Monev	Wawancara mendalam, Observasi

No	Informan	Jabatan / Instansi	Peran dalam E-Monev	Teknik Pengumpulan Data
3	I-3	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan, Bappeda	Pengawas infrastruktur teknis E-Monev	Wawancara mendalam
4	I-4	Staf Pengelola Aplikasi E-Monev (Teknis)	Admin teknis sistem E-Monev	Wawancara mendalam, Observasi
5	I-5	Kasubbag Penyusunan Program, OPD Perpustakaan	Operator pelaporan E-Monev (OPD)	Wawancara mendalam
6	I-6	Kasubbag Penyusunan Program, Kecamatan Malinau Barat	Operator pelaporan E-Monev (Kecamatan)	Wawancara mendalam
7	I-7	Kasubbag Penyusunan Program, Diskominfo	Operator pelaporan E-Monev (OPD Teknis)	Wawancara mendalam

Sumber: Diolah peneliti (2026)

Tabel 2. Operasional Konsep Penelitian

Dimensi	Sub-Dimensi	Indikator	Sumber Data
Support (Dukungan)	Komitmen Pimpinan	Arahan kebijakan, instruksi tertulis, konsistensi pimpinan mendorong penggunaan E-Monev	Wawancara, Dokumentasi
	Kejelasan Regulasi & SOP	Keberadaan regulasi, SOP, dan pedoman teknis penggunaan E-Monev di level OPD	Dokumentasi, Wawancara
	Koordinasi & Pengawasan	Mekanisme koordinasi Bappeda-OPD, konsistensi pelaporan triwulan	Wawancara, Observasi
Capacity (Kapasitas)	Infrastruktur TI	Ketersediaan server, jaringan internet, perangkat keras di OPD dan kecamatan terpencil	Observasi, Dokumentasi
	Kompetensi SDM	Kemampuan operator mengoperasikan E-Monev, frekuensi pergantian operator OPD	Wawancara, Observasi

Dimensi	Sub-Dimensi	Indikator	Sumber Data
	Sosialisasi & Anggaran	Frekuensi pelatihan formal, ketersediaan anggaran operasional dan pengembangan sistem	Dokumentasi, Wawancara
Value (Nilai/Manfaat)	Manfaat bagi Pengguna	Efisiensi pelaporan, kemudahan akses, pengurangan waktu dan biaya dibanding metode manual	Wawancara, Observasi
	Manfaat bagi Pemda	Peningkatan akuntabilitas, ketepatan data, transparansi capaian program, basis pengambilan keputusan	Wawancara, Dokumentasi

Sumber: Diadaptasi dari Indrajit (2016) dan Harvard JFK School of Government

Tabel 3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik	Prosedur	Tujuan / Output
Wawancara Mendalam	Semi-terstruktur, 7 informan purposive, panduan 12–15 pertanyaan per dimensi	Menggali persepsi, pengalaman, dan penilaian informan terhadap dimensi Support, Capacity, Value
Observasi	Observasi langsung proses input data E-Monev, kondisi infrastruktur TI OPD	Memverifikasi kondisi nyata di lapangan: jaringan, perangkat, praktik pelaporan
Studi Dokumentasi	Analisis dokumen RKPD, Perbup, SOP, laporan realisasi, rekap capaian E-Monev	Memperkuat data primer dengan bukti dokumenter resmi
Triangulasi	Triangulasi sumber (lintas informan) dan teknik (lintas metode pengumpulan)	Meningkatkan kredibilitas dan keabsahan data penelitian (Creswell, 2018)
Analisis Data	Reduksi data,Penyajian data, Penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014)	Menghasilkan interpretasi yang sistematis sesuai kerangka Support–Capacity–Value

Sumber: Diolah peneliti (2026)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis elemen sukses E-Government melalui implementasi aplikasi E-Monev di Bappeda Kabupaten Malinau menggunakan kerangka Harvard JFK School of Government dalam Indrajit (2016) yang meliputi tiga dimensi utama: Support, Capacity, dan Value.

Tabel 4. Ringkasan Temuan Penelitian per Dimensi

Dimensi	Kondisi Positif (Strength)	Kondisi Negatif (Weakness)	Implikasi terhadap Keberhasilan E-Monev
Support	Komitmen pimpinan kuat; regulasi makro tersedia (Perpres 95/2018, Permendagri 86/2017)	SOP teknis di OPD belum merata; koordinasi dan pengawasan lintas instansi belum konsisten	Ketidakkonsistenan koordinasi berdampak pada keterlambatan dan ketidaklengkapan pelaporan triwulan
Capacity	Infrastruktur server terpusat; operator muda cukup mampu; solusi Starlink tersedia	Jaringan internet tidak merata di kecamatan terpencil; seringnya pergantian operator OPD; pelatihan formal terbatas	Ketimpangan kapasitas SDM dan infrastruktur digital menurunkan kualitas dan konsistensi data dalam E-Monev
Value	Efisiensi pelaporan meningkat signifikan; akurasi data lebih baik; integrasi dengan SAKIP dan SIPD	Data E-Monev belum dioptimalkan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan	Potensi nilai strategis E-Monev belum terealisasi penuh; diperlukan penguatan budaya data-driven governance

Sumber: Analisis peneliti berdasarkan data lapangan (2026)

3.1 Dukungan (Support) dalam Implementasi Aplikasi E-Monev

3.1.1 Komitmen Pimpinan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kepala Bappeda Kabupaten Malinau memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong implementasi E-Monev. Sebagaimana dinyatakan oleh informan kunci (I-1): "Digitalisasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Penggunaan E-Monev didorong untuk mempercepat pelaporan kinerja OPD agar tidak lagi dilakukan secara manual serta meningkatkan efisiensi dan kecepatan akses data." Komitmen ini diwujudkan melalui konsep smart government yang mendorong integrasi seluruh layanan pemerintahan agar dapat diakses secara transparan.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Mbatha dan Ocholla (2018) yang menemukan bahwa komitmen kepemimpinan puncak merupakan faktor paling determinan dalam keberhasilan implementasi sistem digital di sektor publik negara berkembang. Dalam konteks Indonesia, Indrayani et al. (2025) juga menemukan bahwa dukungan pimpinan yang konkret bukan sekadar retorika menjadi pembeda utama antara instansi yang berhasil dan yang gagal dalam implementasi layanan digital.

3.1.2 Kejelasan Regulasi dan SOP

Regulasi pendukung implementasi E-Monev telah tersedia, meliputi kewajiban pelaporan triwulanan (TW1–TW4) yang bersumber dari Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri 90 Tahun 2019. Namun, temuan menunjukkan bahwa SOP pada level OPD belum merata. Informan I-7 (Kasubbag Penyusunan Program Diskominfo) menyatakan: "SOP khusus untuk pengisian di aplikasi E-Monev

tidak ada." Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun regulasi makro tersedia, implementasi SOP teknis di tingkat OPD belum terstandarisasi. Kondisi ini memperkuat temuan Sabani (2021) bahwa ketidakjelasan prosedur teknis merupakan hambatan signifikan adopsi E-Government di Indonesia.

3.1.3 Koordinasi dan Pengawasan

Koordinasi antara Bappeda dan OPD dilakukan melalui surat resmi yang ditandatangani Sekda, rapat teknis, zoom meeting, dan pendampingan langsung. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan berkala terhadap ketepatan waktu pelaporan dan kelengkapan data. Namun, masih ditemukan inkonsistensi dalam kepatuhan pelaporan OPD. Hal ini sejalan dengan temuan Ngai et al. (2020) bahwa kesenjangan koordinasi antarinstansi merupakan salah satu hambatan utama dalam implementasi sistem monitoring berbasis TI di sektor publik.

3.2 Kapasitas (Capacity) Organisasi dalam Implementasi Aplikasi E-Monev

3.2.1 Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur server E-Monev telah terpusat di Bappeda, namun kendala utama adalah jaringan internet, terutama akibat gangguan fiber optik di beberapa kecamatan terpencil. Solusi sementara menggunakan Starlink untuk daerah yang tidak terjangkau jaringan reguler. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan infrastruktur digital yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kabupaten Malinau dengan luas 42.620,70 km² dan 15 kecamatan (BPS Kabupaten Malinau, 2025) menghadapi tantangan konektivitas yang jauh lebih kompleks dibandingkan daerah perkotaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Doran et al. (2023), ketimpangan infrastruktur TIK merupakan faktor pembatas utama pencapaian efektivitas E-Government di daerah yang memiliki kondisi geografis menantang.

3.2.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Secara umum, operator muda mampu mengoperasikan aplikasi E-Monev. Namun, terdapat permasalahan seringnya pergantian operator OPD yang menyebabkan ketidakkonsistenan pemahaman dan mempengaruhi kualitas input data. Selain itu, beban kerja tinggi pada bagian perencanaan menjadi kendala utama. Informan I-2 (Kabid Monitoring dan Evaluasi) menyatakan: "Kendala utama adalah seringnya pergantian operator sehingga pemahaman tidak konsisten dan mempengaruhi kualitas input data." Seyselis dan Pradana (2021) dalam konteks Bappeko Surabaya menemukan permasalahan serupa, yakni pergantian petugas pengisi E-Monev yang berdampak negatif terhadap kontinuitas dan kualitas pelaporan.

3.2.3 Sosialisasi, Pendampingan, dan Anggaran

Sosialisasi dilakukan secara bertahap per-OPD saat proses verifikasi, namun belum merata. Beberapa operator mengaku belajar secara mandiri tanpa pelatihan formal. Anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan E-Monev tersedia, meskipun mengalami efisiensi dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini konsisten dengan temuan Ngai et al. (2020) bahwa keterbatasan pelatihan dan anggaran merupakan hambatan signifikan dalam keberlanjutan sistem monitoring berbasis TI di sektor publik. Bewinda et al. (2024) juga menekankan pentingnya program sosialisasi berkelanjutan dan bukan hanya sosialisasi sekali pada awal implementasi.

3.3 Manfaat (Value) yang Dihasilkan dari Implementasi Aplikasi E-Monev

3.3.1 Manfaat bagi Pengguna

Aplikasi E-Monev terbukti meningkatkan efisiensi pelaporan secara signifikan dibandingkan metode manual. Informan I-5 (Kasubbag Penyusunan Program OPD Perpustakaan) menyatakan: "E-Monev sangat mempermudah dan menghemat waktu dibandingkan metode manual yang sebelumnya dilakukan dengan cara cetak laporan." Fitur dashboard memungkinkan pemantauan capaian kinerja secara real-time dan terintegrasi dengan sistem lain seperti SAKIP dan SIPD. Singh et al. (2020) menegaskan bahwa kemampuan sistem E-Government untuk terintegrasi dengan sistem informasi lain dalam ekosistem pemerintahan merupakan indikator penting nilai sistem tersebut bagi pengguna.

3.3.2 Manfaat bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, E-Monev berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas, ketepatan data, dan kemudahan evaluasi capaian program pembangunan. Kepala Bappeda (I-1) menyatakan bahwa data capaian OPD direncanakan dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi kinerja pemerintah. Temuan ini sejalan dengan argumen Sabani (2021) bahwa nilai transparansi merupakan salah satu manfaat utama yang mendorong keberlanjutan implementasi E-Government. Manoharan et al. (2023) juga menegaskan bahwa e-democracy dan transparansi melalui platform digital merupakan manifestasi tertinggi dari nilai E-Government bagi pemerintah dan masyarakat. Namun demikian, E-Monev belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, yang menjadi area perbaikan penting ke depan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi E-Monev di Bappeda Kabupaten Malinau belum sepenuhnya optimal, yang ditandai oleh belum terbangunnya sinergi kuat antara dimensi Support, Capacity, dan Value. Diskusi berikut membandingkan temuan ini secara kritis dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan.

3.4.1 Perbandingan pada Dimensi Support (Komitmen Pimpinan dan Regulasi)

Penelitian ini menemukan bahwa komitmen pimpinan Bappeda Kabupaten Malinau tergolong kuat, ditandai dengan adanya arahan kebijakan digitalisasi dan dukungan terhadap konsep smart government. Temuan ini sejalan dengan penelitian Seyselis dan Pradana (2021) yang mengkaji E-Monev di Bappeko Surabaya, di mana komitmen pimpinan juga menjadi faktor kunci yang mendorong efektivitas sistem monitoring. Namun, terdapat perbedaan mencolok pada aspek koordinasi: di Surabaya sebagai kota metropolitan, koordinasi antarinstansi berjalan relatif lebih konsisten karena ditunjang oleh kedekatan geografis dan infrastruktur komunikasi yang memadai. Sementara di Kabupaten Malinau, koordinasi Bappeda dengan OPD kecamatan terpencil masih menghadapi hambatan geografis yang menyebabkan ketidakkonsistenan pelaporan triwulanan.

Perbandingan dengan penelitian Vallen Dwi Puspita et al. (2024) tentang Simonev di Bappeda Provinsi Lampung mengungkap kesamaan temuan, yakni regulasi makro yang tersedia belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam SOP teknis di tingkat pelaksana. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa ketidakjelasan prosedur teknis pada level OPD merupakan hambatan sistemis implementasi E-

Government di Indonesia, sebagaimana juga dikemukakan oleh Sabani (2021). Perbedaannya, konteks Lampung sebagai provinsi memiliki kapasitas anggaran sosialisasi yang lebih besar dibandingkan Kabupaten Malinau yang menghadapi efisiensi anggaran dalam dua tahun terakhir, sehingga keseragaman implementasi SOP di Malinau lebih sulit dicapai.

3.4.2 Perbandingan pada Dimensi Capacity (SDM dan Infrastruktur)

Temuan penelitian ini tentang seringnya pergantian operator OPD sebagai hambatan utama kapasitas SDM berkorespondensi langsung dengan temuan Seyselis dan Pradana (2021) yang juga menemukan rotasi petugas sebagai permasalahan signifikan dalam kontinuitas pelaporan E-Monev di Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan rotasi SDM merupakan isu lintas konteks yang tidak hanya terjadi di daerah terpencil, melainkan juga di kota-kota besar. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi baru yang tidak ditemukan dalam penelitian Seyselis dan Pradana (2021), yakni ketimpangan infrastruktur digital akibat faktor geografis. Kabupaten Malinau dengan luas 42.620,70 km² menghadapi tantangan konektivitas jaringan internet yang jauh lebih kompleks, di mana gangguan fiber optik di kecamatan terpencil memaksa penggunaan solusi alternatif berbasis satelit (Starlink). Kondisi ini tidak ditemukan dalam penelitian E-Monev di Surabaya maupun Lampung yang memiliki infrastruktur digital relatif lebih memadai.

Dibandingkan dengan penelitian Amanda (2025) tentang E-Monev di BKKBN Provinsi Jawa Timur, kesamaan ditemukan pada hambatan infrastruktur dan kompetensi SDM. Namun perbedaannya, konteks BKKBN adalah instansi vertikal dengan standar pelatihan nasional yang lebih terstruktur, sementara Bappeda Kabupaten Malinau mengandalkan sosialisasi bertahap per-OPD yang belum merata dan sebagian besar operator belajar secara mandiri. Temuan ini memperkuat pandangan Bewinda et al. (2024) bahwa sosialisasi berkelanjutan—bukan hanya sosialisasi sekali di awal implementasi—merupakan prasyarat keberhasilan E-Government, khususnya di daerah dengan tingkat rotasi SDM yang tinggi.

3.4.3 Perbandingan pada Dimensi Value (Manfaat dan Pemanfaatan Data)

Pada dimensi Value, penelitian ini menemukan bahwa E-Monev berhasil meningkatkan efisiensi pelaporan dan akurasi data secara signifikan, namun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai basis pengambilan keputusan strategis. Temuan ini memiliki keselarasan dengan penelitian Romodon (2020) tentang integrasi SiPECEL dan E-Monev di Kabupaten Blitar yang juga menyimpulkan bahwa nilai utama sistem terletak pada peningkatan transparansi dan efisiensi, meskipun optimalisasi sebagai alat pengambilan keputusan masih memerlukan penguatan. Senada dengan itu, Zulkarnaen dan Ruma (2024) dalam penelitian di Bappeda Kota Parepare menemukan bahwa monitoring dan evaluasi berbasis digital memiliki pengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan, namun belum secara otomatis mendorong budaya pengambilan keputusan berbasis data.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat dan memperluas temuan penelitian-penelitian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa keberhasilan E-Monev di daerah terpencil bukan hanya ditentukan oleh satu dimensi tunggal, melainkan oleh sinergi terpadu antara Support, Capacity, dan Value. Kebaruan temuan penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam mengidentifikasi faktor geografis dan ketimpangan infrastruktur digital sebagai variabel kontekstual yang secara signifikan

memoderasi hubungan antara komitmen kelembagaan dan efektivitas implementasi E-Government, sebuah aspek yang belum dieksplorasi secara mendalam oleh penelitian-penelitian sebelumnya di Indonesia.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

3.5.1 Paradoks Komitmen Tinggi dan Capaian Rendah

Temuan menarik yang muncul dalam penelitian ini adalah adanya paradoks antara komitmen pimpinan yang dinilai kuat secara retorika, namun di sisi lain rata-rata capaian kinerja perangkat daerah pada tahun 2024 hanya mencapai 26,72 persen dan realisasi anggaran hanya 18,65 persen. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen formal (de jure) dan implementasi substantif (de facto). Kondisi ini sejalan dengan temuan Indrayani et al. (2025) yang membedakan antara "dukungan pimpinan yang konkret" dan "dukungan yang bersifat retorika," di mana hanya dukungan yang diterjemahkan dalam mekanisme pengawasan nyata yang mampu menghasilkan perubahan perilaku birokrasi secara berkelanjutan. Paradoks ini menjadi catatan penting bahwa komitmen pimpinan saja tidak cukup tanpa diikuti oleh sistem akuntabilitas yang terstruktur dan mekanisme sanksi yang jelas bagi OPD yang terlambat atau tidak lengkap dalam mengisi E-Monev.

3.5.2 Starlink sebagai Solusi Adaptif atas Ketimpangan Digital

Temuan menarik lainnya adalah penggunaan teknologi satelit Starlink sebagai solusi sementara atas keterbatasan jaringan fiber optik di kecamatan terpencil. Adaptasi teknologi ini mencerminkan daya inovasi lokal (local adaptive innovation) yang menarik secara akademis, karena menunjukkan bahwa daerah terpencil tidak serta-merta pasif dalam menghadapi tantangan infrastruktur, melainkan secara aktif mencari solusi alternatif. Namun, penggunaan Starlink sebagai infrastruktur utama layanan pemerintahan digital juga mengandung risiko terkait ketergantungan pada penyedia layanan komersial asing, biaya langganan yang tidak selalu dapat dijamin keberlanjutannya dalam kondisi efisiensi anggaran, serta potensi masalah keamanan data pemerintahan. Temuan ini membuka ruang diskusi baru tentang strategi infrastruktur digital pemerintah daerah terpencil yang belum banyak dibahas dalam literatur E-Government Indonesia sebelumnya.

3.5.3 Integrasi E-Monev dengan SAKIP dan SIPD sebagai Nilai Tambah yang Belum Dioptimalkan

Penelitian ini juga mengungkap fakta menarik bahwa E-Monev di Bappeda Kabupaten Malinau telah terintegrasikan dengan sistem informasi lain seperti SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Integrasi ini secara potensial menciptakan ekosistem data yang komprehensif untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa integrasi teknis yang tersedia tersebut belum diikuti oleh budaya penggunaan data (data-driven culture) di kalangan pengambil keputusan. Data yang tersedia di E-Monev belum secara rutin dan sistematis dijadikan basis pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan. Kondisi ini relevan dengan pandangan Manoharan et al. (2023) yang menegaskan bahwa digital governance yang efektif mensyaratkan tidak hanya ketersediaan sistem, tetapi juga transformasi budaya organisasi menuju pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making).

Temuan ini mengindikasikan bahwa agenda reformasi digital Kabupaten Malinau perlu bergeser dari sekadar digitalisasi proses (process digitalization) menuju internalisasi nilai data (data value internalization) pada level pimpinan dan pengambil kebijakan.

3.5.4 Beban Ganda Operator OPD sebagai Hambatan Tersembunyi

Temuan lain yang patut mendapat perhatian adalah beban kerja ganda yang dipikul oleh operator OPD. Selain menjalankan tugas pokoknya di bagian perencanaan, operator juga bertanggung jawab mengisi data E-Monev secara berkala. Beban kerja yang tinggi ini tidak hanya berpotensi menurunkan kualitas input data, tetapi juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya rotasi atau pengunduran diri dari posisi operator. Kondisi ini merupakan temuan yang jarang disorot secara eksplisit dalam penelitian E-Government sebelumnya di Indonesia. Penelitian yang ada umumnya menyoroti rotasi SDM sebagai masalah administratif, namun penelitian ini mengidentifikasi beban kerja berlebih (work overload) sebagai akar penyebab yang lebih mendasar. Hal ini membuka perspektif baru bahwa solusi terhadap masalah SDM dalam E-Government tidak cukup hanya dengan pelatihan, melainkan juga perlu mempertimbangkan redesain beban kerja dan penetapan jabatan fungsional khusus pengelola sistem informasi di setiap OPD.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi aplikasi E-Monev di Bappeda Kabupaten Malinau belum sepenuhnya optimal karena belum terbangunnya sinergi yang kuat antara dimensi Support, Capacity, dan Value dari kerangka Harvard JFK School of Government. Pada dimensi Support, komitmen pimpinan dan regulasi makro telah tersedia, namun koordinasi dan pengawasan antarperangkat daerah belum konsisten. Pada dimensi Capacity, keterbatasan infrastruktur jaringan internet di daerah terpencil, seringnya pergantian operator, dan kurangnya pelatihan formal menjadi hambatan utama. Pada dimensi Value, E-Monev berhasil meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaporan, meskipun belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengambilan keputusan strategis.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi kerangka Harvard JFK School of Government (Support-Capacity-Value) dalam konteks E-Government daerah terpencil di Indonesia, dan menambahkan perspektif bahwa faktor geografis dan rotasi SDM merupakan variabel kontekstual penting yang perlu dipertimbangkan dalam model implementasi E-Government. Adapun saran penelitian ini meliputi: (1) penguatan koordinasi kelembagaan antara Bappeda dan seluruh OPD melalui mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur; (2) peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan penetapan operator tetap di setiap OPD; (3) perluasan infrastruktur jaringan internet ke seluruh kecamatan di Kabupaten Malinau; serta (4) optimalisasi pemanfaatan data E-Monev sebagai basis pengambilan keputusan strategis dan perencanaan pembangunan berbasis data.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada implementasi aplikasi E-Monev di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malinau. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil penelitian menggambarkan kondisi berdasarkan perspektif informan pada waktu penelitian

dilakukan. Keterbatasan waktu penelitian juga menyebabkan belum dapat dilakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap perkembangan implementasi aplikasi E-Monev dalam jangka panjang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam menggambarkan implementasi aplikasi E-Monev secara lebih luas. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada beberapa perangkat daerah atau pemerintah daerah lainnya untuk memperoleh perbandingan hasil yang lebih komprehensif. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji pengaruh implementasi aplikasi E-Monev terhadap peningkatan kualitas pengambilan keputusan, kinerja pembangunan daerah, serta keberhasilan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, bantuan, dan motivasi selama proses pelaksanaan penelitian ini, baik dari lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pemerintah Kabupaten Malinau, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malinau, keluarga, sahabat, maupun rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Amanda, S. Y. (2025). Analisis Efektivitas Aplikasi e-Monev dalam Monitoring Penyerapan Anggaran di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 3(2), 615–622. https://doi.org/10.61579/future.v3i2.418

Indrajit, R. E. (2016). Konsep dan Strategi Electronic Government. Electronic Government, 84, 1–166. https://www.academia.edu/30100450/Electronic_Government

Romodon, I. (2020). ELECTRONIC DISBURSEMENT INFORMATION SYSTEM (SiPECEL) AND MONITORING EVALUATION (e-MONEV) IN ORDER TO CREATE TRANSPARENCY OF PUBLIC SERVICES IN BLITAR REGENCY. Ilmu Manajemen, 2, 1–9. https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/revitalisasi/article/view/1911

Rozikin, . M, Hesty, . W, & Sulikah. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah COLLABORATION AND E-LITERACY: KEY SUCCESS INNOVATION OF LOCAL E-GOVERMENT. Jurnal Borneo Administrator, 16(1), 61–80.

Vallen Dwi Puspita, O., Mulyana, N., & Apandi. (2024). Implementasi Sistem Monitoring Dan Evaluasi (Simoev) Dalam Pengukuran Capaian Program Perencanaan Pembangunan Di Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung. Implementasi Sistem Monitoring Dan Evaluasi (Simoev) Dalam Pengukuran Capaian Program Perencanaan Pembangunan Di Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung, 21(1), 1–112. https://ejurnal.ubl.ac.id/index.php/JIP/article/view/4014

Zulkarnaen, M. F., & Ruma, Z. (2024). The effect of monitoring and evaluation implementation on the transparency of Parepare City bappeda financial reports. Journal of Management …, 7(3), 558–564. http://exsys.iocspublisher.org/index.php/JMAS/article/view/502%0Ahttps://exsys.iocspublisher.org/index.php/JMAS/article/download/502/334

Indrajit, R. E. (2016). Konsep dan Strategi Electronic Government. Electronic Government, 84, 1–166. https://www.academia.edu/30100450/Electronic_Government

Rozikin, . M, Hesty, . W, & Sulikah. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah COLLABORATION AND E-LITERACY: KEY SUCCESS INNOVATION OF LOCAL E-GOVERMENT. Jurnal Borneo Administrator, 16(1), 61–80.

Seyselis, M., & Pradana, G. W. (2021). Efektivitas sistem Electronic Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Publika, 9(1), 37–48. https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p37-48

Alotaibi, S. J., & Raven, A. (2016). Factors influencing the adoption of e-government services among citizens in Saudi Arabia: An exploratory study. Journal of Information Technology Management, 27(4), 1–14.

Doran, N. M., Puiu, S., Bădîrcea, R. M., Pirtea, M. G., Doran, M. D., Ciobanu, G., & Mihit, L. D. (2023). E-government development—A key factor in government administration effectiveness in the European Union. Electronics, 12(3), 641. https://doi.org/10.3390/electronics12030641

Manoharan, A. P., Melitski, J., & Holzer, M. (2023). Digital governance: An assessment of performance and best practices. Public Organization Review, 23, 265–283. https://doi.org/10.1007/s11115-021-00584-8

Mbatha, B., & Ocholla, D. N. (2018). Critical success factors for digital government adoption in developing countries: Lessons from South Africa. South African Journal of Information Management, 20(1), 1–9. https://doi.org/10.4102/sajim.v20i1.921

Ngai, E. W. T., Hu, Y., Wong, Y. H., Chen, Y., & Sun, X. (2020). IT-enabled monitoring systems in public sector organisations: Success factors and organisational outcomes. International Journal of Information Management, 53, 102–118. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102131

Sabani, A. (2021). Investigating the influence of transparency on the adoption of e-government in Indonesia. Journal of Science and Technology Policy Management, 12(2), 236–255. https://doi.org/10.1108/JSTPM-05-2019-0058

Sabani, A., Deng, H., & Thai, V. (2019). Evaluating the performance of e-government in Indonesia: A thematic analysis. ACM International Conference Proceeding Series. https://doi.org/10.1145/3326365.3326388

Singh, H., Grover, P., Kar, A. K., & Ilavarasan, P. V. (2020). Review of performance assessment frameworks of e-government projects. Transforming Government: People, Process and Policy, 14(1), 31–64. https://doi.org/10.1108/TG-02-2019-0011

Bewinda, R. N., Prabowo, H., Indrayani, E., & Gatiningsih, G. (2024). Revisiting E-Government services in the provincial government of DKI Jakarta: A case study on the management of public complaints. Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 9(2), 406–420. https://doi.org/10.25008/jkiski.v9i2.1123

Gatiningsih, G., Sartika, I., Indrayani, E., & Wasistiono, S. (2022). Manpower planning based on digital economy horticultural agriculture sector in Cianjur Regency, West Java Province. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 5(2), 11074–11088.

Indrayani, E. (2020). E-Government: Konsep, implementasi dan perkembangannya di Indonesia. LPP Balai Insan Cendekia.

Indrayani, E., Akbar, F., & Diantoro, S. (2025). Overcoming challenges in digital public service delivery: Insights from Lapak Aduan implementation. TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan, 17(2), 103–121. https://doi.org/10.33701/jtp.v17i2.3677

Indrayani, E., & Wahyuni, R. (2024). Navigasi digital: Transformasi sistem informasi geografis dalam tata kelola informasi pemerintahan. IPDN Press.

Labolo, M., & Indrayani, E. (2017). Bureaucratic reform and the challenge of good governance implementation in Indonesia. Journal of Asian Review of Public Affairs and Policy, 2(4), 25–47.
Prabowo, H., Indrayani, E., Rusfiana, Y., & Sinaga, O. (2022). Development of local government capacity in managing Indonesia-Malaysia border area (study on Sebatik Island). The Croatian International Relations Review (CIRR), 28(90), 117–134.
Creswell, J. W. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). Sage Publications.
Indrajit, R. E. (2016). Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital. Andi Offset.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Sage Publications.